

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
		<input checked="" type="checkbox"/>											

BPKAD Lamsel Tidak Mau Beberkan Tanah Sitaan KPK

BADAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan enggan membeberkan tanah sitaan yang KPK serah kepada Pemkab setempat. Padahal, jelas-jelas aset daerah berada di bawah tanggung jawab di BPKAD setempat.

Kepala BPKAD Lampung Selatan Intji Indriati enggan menjelaskan secara terperinci tanah sitaan

(barang rampasan, red) KPK dari tindak pidana korupsi free proyek dengan tersangka mantan Bupati Lamsel Zainuddin Hasan. "Saya enggak tahu, silakan tanya saja dengan sekkab," ujarnya sambil berusaha menghindar ketika ditemui di depan ruang Sekkab, Jumat (19/2).

Dia juga mengelak terkait yang mengurus aset daerah dalah

pihaknya. "Tugas saya hanya membayar saja," katanya sembari bergegas ke ruang Aula Rajabasa Kantor Bupati untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian bupati dan wakil bupati terpilih secara virtual.

Padahal, empat anggota KPK menyambangi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Senin (16 Novem-

ber 2020). Saat itu, Sekkab Lamsel Thanurin menyatakan kedatangan komisi antirasuah itu ke BPKAD untuk mendata aset yang berkaitan dengan kasus mantan Bupati setempat Zainuddin Hasan.

"Rencananya, KPK akan menyerahkan aset tersebut ke Pemkab Lamsel, Selasa, 17 November 2020," ujarnya. (TOR/DI)